

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan sebuah ilmu yang tidak lepas dari masalah keuangan atau ekonomi. Akuntansi selain didefinisikan sebagai ilmu dapat juga dapat didefinisikan sebagai seni maupun teknologi. Jadi yang perlu dipahami dari beberapa definisi tersebut akuntansi merupakan sebuah proses. Definisi akuntansi adalah sebuah proses yaitu, Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (American Accounting Association, 1966).

Organisasi merupakan sebuah wadah diterapkannya akuntansi. Organisasi sendiri adalah sekumpulan orang dengan tujuan bersama, tujuan paling umum bagi organisasi dapat dibagi menjadi dua. Organisasi dengan tujuan atau motif mencari laba dan organisasi dengan tujuan atau motif mencari selain laba. Dua perbedaan tujuan organisasi tersebut pun memecah penggunaan akuntansi, akuntansi yang digunakan untuk organisasi dengan tujuan mencari laba adalah akuntansi bisnis, sedangkan akuntansi yang digunakan oleh organisasi non-laba adalah akuntansi sektor publik. Dengan begitu akuntansi sektor publik pun memiliki karakteristik yang berbeda dengan

akuntansi bisnis. Karakteristik akuntansi sektor publik berfokus pada dua yaitu sifat dan tujuan lembaga dimana fokus pada sifat akuntansi tersebut adalah khusus organisasi non-laba, dan tujuan lembaga dimana fokus untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan publik (Hantono Dkk, 2021).

Akuntansi sektor publik sangat berhubungan dengan menggunakan penerapan dan perlakuan domain publik. Domain publik sendiri memiliki cakupan yang relatif luas dan lebih rumit dibandingkan dengan sektor bisnis/usaha. Perdebatan tentang akuntansi sektor publik yang seharusnya memiliki bagian yang lebih besar asal praktisi serta akademisi serius pada upaya, yang diklaim kurang efisien dan menarik untuk mengikuti sektor swasta yang diklaim lebih maju dan efisien. Sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas serta profesionalisme serta *value for money* dalam menjalankan menjalankan peranannya. Konsep *value for money* mendasar pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisien, dan efektif. Selain itu tuntutan akuntabilitas publik dan *good governance* (Jamaluddin M, 2019).

Organisasi non-laba yang paling mudah untuk dilihat yaitu organisasi pemerintahan (Majid, 2019:06). Seperti yang disebut bahwa organisasi pemerintahan merupakan organisasi non-laba, organisasi pemerintah berfokus dan bergerak dalam melayani publik (*public service*). Akuntansi sektor publik di Indonesia merupakan tugas dan peran yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara hukum yang menuntut lembaga publik untuk dapat mengelola keuangan. Transparansi

mengenai akuntabilitas sangat diperlukan dalam melayani publik, karena setiap pencapaian dari setiap bidang merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR/D. Dengan adanya informasi tentang akuntabilitas kinerja, pemerintahan memiliki bahan untuk mengambil keputusan dalam melakukan perbaikan

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu yang terangkum dalam media pers. Pertanggungjawaban isu berupa laporan kepada pimpinan masing-masing, pengawas, dan penilaian pertanggungjawaban, yang kemudian diserahkan kepada kepala pemerintahan masing-masing. Laporan yang dimaksud menunjukkan kemampuan masing-masing instansi melalui akuntabilitas operasional instansi. Akuntabilitas kinerja instansi berperan penting dalam mencapai visi, misi, dan tujuan instansi, Berperan sebagai penilaian kinerja. Institusi nasional wajib bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya dari tugas dan tanggung jawab mereka. Praktik akuntan publik berjalan seiring dengan akuntabilitas kinerja lembaga. Perkembangan menarik di sektor publik Indonesia adalah meningkatnya tekanan akuntabilitas publik dari otoritas pusat dan daerah. Akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam memberikan informasi tentang kegiatan pemerintah daerah dan kapasitas keuangan untuk mempromosikan keterbukaan dan menciptakan akuntabilitas publik.

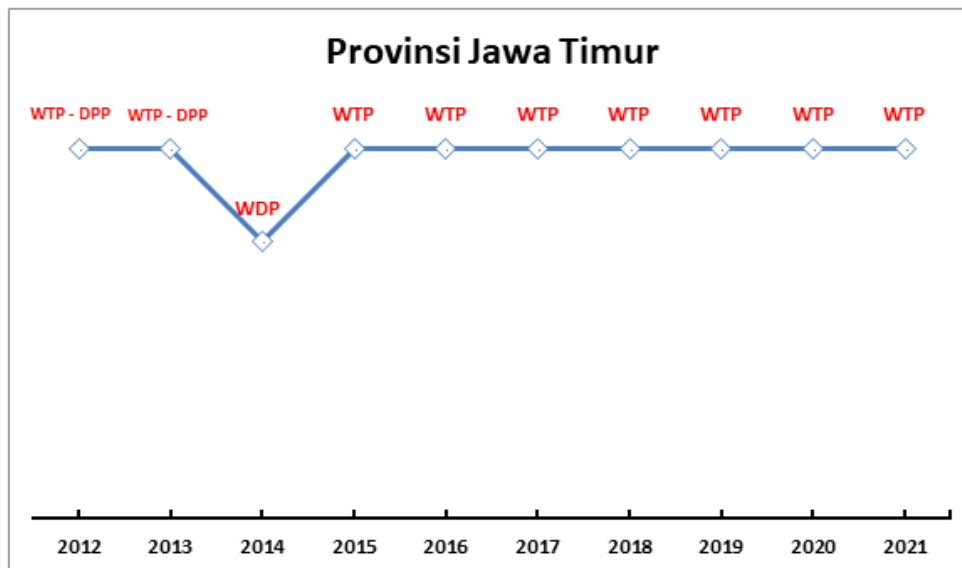
Akuntabilitas merupakan sesuatu yang mendapatkan sorotan dalam melayani publik. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Perbaikan akuntabilitas dalam bidang ekonomi dapat mendorong kemajuan negara yang berawal dari membaiknya iklim investasi. Sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas pemerintah dapat membantu dalam melayani publik (*public service*) sehingga dapat membangun tingkat kepercayaan masyarakat. Hal-hal tersebut akhirnya berakhir pada pemerintahan yang baik (*good governance*) (Jamaludin M, 2019).

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu cabang implementasi dari akuntansi sektor publik. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Purnama Sari, Tamsir, 2023). Standar Akuntansi Pemerintahan telah menguraikan dengan jelas kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 (Ayem & Prihatin, 2020). Untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan pemerintah terpenuhi, unsur kualitatif harus dipenuhi (Muslimin & Sulfianty, 2020). Laporan keuangan harus mematuhi ukuran-ukuran normatif dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya (Karim, 2019). Kualitas pelaporan keuangan pemerintah ditentukan oleh keandalannya, relevansinya, kemampuan

untuk dibandingkan, dan kemudahan dipahami (Hasanah & Siregar, 2021). Kualitas laporan keuangan daerah dapat diukur dari penilaian Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya (Jati, 2019).

Saat BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan LKPD, berarti bahwa laporan keuangan organisasi pemerintah daerah tersebut telah disajikan dan diungkapkan dengan tepat dan bermutu (Hasniati dkk, 2023). Sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberikan opini.

Gambar 1. 1 Grafik Hasil Audit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur



Sumber: badan pengelolaan keuangan perwakilan jawa timur 2022

Dari grafik diatas beberapa tahun kebelakang pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur mendapat satu opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2014 dan selebihnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. badan pemeriksa keuangan menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin bebas dari korupsi (jatim.bpk.go.id 10 Maret 2015). Hal ini dikarenakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh BPK dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan suatu instansi pemerintah adalah kesesuaian pos-pos laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kesesuaian ini tidak menunjukkan kebenaran dari transaksi tertentu. Opini mengenai laporan keuangan tidak bergantung pada apakah terdapat korupsi di dalam entitas tersebut atau tidak.

Seperti yang diposting BPK dalam situsnya, meskipun opini WTP dikeluarkan namun kasus beberapa tahun kebelakang masih banyak ditemui. Berdasarkan catatan direktori perkara korupsi ada hingga 112 tindak pidana korupsi di Jawa Timur (jawapos.com 24 Desember 2022). Meskipun, menurut Survei Penilaian Integritas (SPI), Jatim mendapat nilai tinggi. Jawa Timur mendapat skor yang cukup bagus. Jawa Timur secara keseluruhan memiliki skor rata-rata 75,24 yang merupakan rata-rata komponen internal dan eksternal. Skor termasuk dalam kategori alarm. Kabar baiknya, skor tersebut lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 72,4.

Rendahnya akuntabilitas dari instansi pemerintahan di Indonesia terlihat jelas dari banyaknya praktik korupsi. Meskipun menurut data,

Indonesia sudah mampu menaikkan 1 point daripada tahun lalu (transparency.org 2021). Hal itu masih menunjukkan jauhnya hasil yang dicapai dari kata memuaskan. Pencegahan korupsi merupakan tantangan bagi pemerintah dan perlu ditangani dengan serius. Salah satu penanganan adalah pengembangan akuntansi yang baik oleh pemerintah dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah (BPK RI, 1995).

Kurangnya akuntabilitas kinerja tidak hanya dilihat dari faktor korupsi. Namun juga dapat dilihat dari pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna. Kurangnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan yaitu karena kurang cepat dalam menangani maupun menyelesaikan kepentingan yang dibawa oleh masyarakat. panjangnya antrean menyebabkan masyarakat menjadi malas mengurus kepentingannya.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terlaksananya pelayanan instansi pemerintahan yang baik dan bersih mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pertanggungjawaban yang efektif. Upaya pemerintah yaitu dengan menciptakan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum penerapan SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penerapan sistem tersebut oleh pemerintah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bebas dari praktik-praktik kotor seperti korupsi.

Beberapa penelitian sebelumnya Siska Septiani (2022) mengatakan bahwa variabel akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu pula yang ditemui oleh Pebri Ashari Putra (2021) hal yang sama yaitu pengaruh signifikan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi, penerapan akuntansi sektor public memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran. Sedangkan pada Rosalia Eka (2022) mengatakan variabel akuntansi sektor publik tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Akuntansi sektor public belum mampu menunjang akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian tersebut, peneliti tertarik membuat penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur?

2. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjelaskan teori yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi di lapangan saat ini yaitu teori keagenan (*agency theory*) dengan menguji pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan bantuan serta manfaat atau juga bahan evaluasi dalam penerapan akuntansi sektor publik dan juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Penelitian juga diharapkan dapat saling melengkapi penelitian-penelitian terdahulu atau yang akan dilakukan oleh peneliti sesudah dalam mengkaji pengaruh

akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas dan kinerja dan mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan wawasan atau referensi bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur akan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan demi meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.
- b. Sebagai penambah wawasan atau referensi bagi peneliti maupun pembaca dari segala bentuk aspek dalam pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.